

ABSTRAK

Digitalisasi proses bisnis pada organisasi pemerintah menuntut pengawasan yang adaptif, salah satunya melalui *continuous audit continuous monitoring* (CACM). CACM diterapkan guna mendukung penyediaan data yang cepat, akurat dan *real time* sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan untuk memberi jaminan yang segera, berkualitas dan menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memulai penerapan CACM sejak tahun 2022 sebagai satu dari sembilan strategi untuk mencegah risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kementerian PUPR menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bernilai besar sehingga proses pengadaan barang/jasa dianggap berisiko tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui penerapan CACM yang dilakukan pada Kementerian PUPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-studi komparatif dengan membandingkan penerapan CACM antara Kementerian PUPR dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sudah lebih lama mengimplementasikan CACM. Penelitian ini membahas dan membandingkan faktor pemicu, pendekatan dalam pengembangan CACM, implikasi dari kedua hal tersebut serta pembelajaran yang dapat diambil dari proses yang telah dilakukan kedua organisasi. Pembahasan mengenai pengembangan CACM ditinjau dari kesiapan atas empat aspek, yaitu aspek organisasi, teknologi informasi, sumber daya manusia dan dukungan lingkungan. Penerapan CACM di Kementerian PUPR dan BPKP difasilitasi oleh aplikasi proses pembangunannya mengacu pada daur hidup pengembangan sistem (*system development life cycle*). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengembangan CACM pada setiap organisasi bisa berbeda, tergantung dari proses bisnis dan kapasitas yang dimiliki. Tidak ada pendekatan yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan dan risiko yang perlu dikelola agar CACM dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak berupa peningkatan tata kelola organisasi.

Kata kunci: CACM, pencegahan risiko penyimpangan PBJ, pengembangan aplikasi

Abstract

Digitalization of business processes in government organizations demands adaptive monitoring, one of which is through continuous audit continuous monitoring (CACM). CACM is implemented to support the provision of fast, accurate and real time data so monitoring activities can be carried out to provide immediate, quality assurance and wider scope. The Ministry of Public Works and Public Housing (Kementerian PUPR) has started implementing CACM since 2022 as one of nine strategies to prevent the risk of irregularities in the goods/services procurement process. Kementerian PUPR carries out large-value infrastructure development, that the process of procuring goods/services is considered high risk. This research is qualitative research with the aim of knowing the implementation

of CACM at Kementerian PUPR. This research uses a descriptive-comparative study approach by comparing the implementation of CACM between Kementerian PUPR and Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan which has been implementing CACM for longer. This research discusses and compares the trigger factors, approaches to developing CACM, the implications of these two things and the lessons that can be taken from the processes carried out by the two organizations. The discussion regarding the development of CACM is viewed from the readiness of four aspects: organizational aspects, information technology, human resources and environmental support. The implementation of CACM in Kementerian PUPR and BPKP is facilitated by application. Development process of the application refers to the system development life cycle. From this research it can be seen that the development of CACM in each organization can be different, depending on the business processes and capacities they have. There is no completely good or completely bad approach. Each has advantages, disadvantages and risks that need to be managed so that CACM can be implemented well and have an impact to improve organizational governance.

Keywords: CACM, procurement risk prevention, application development